

PTM DIBERLAKUKAN 50 PERSEN

Antisipasi Lonjakan Covid-19, Ubah Strategi

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya tengah mengkaji untuk mengubah strategi kebijakan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19. Terutama menyangkut rencana pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen yang kini kembali diberlakukan 50 persen. Aturan mengenai pertemuan warga di wilayah juga bakal diubah.

Wakil Walikota yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Heroe Poerwadi, mengungkapkan pihaknya sudah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengevaluasi hasil skrining terhadap siswa yang mengikuti PTM di sekolah. "Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan Desember lalu, temuan (skrining) PTM sekarang justru lebih rendah. Tapi kita harus melihat potensi kenaikan yang ada di Yogyakarta. Sehingga memang harus evaluasi," terangnya, Rabu (2/2).

Temuan hasil skrining Covid-19 terhadap siswa yang menjalani PTM di sekolah saat ini cenderung rendah. Dari sekitar 2.000 sampel

siswa yang diteliti, hasil positif hanya berkisar dua hingga tiga kasus. Sedangkan pada Desember lalu berkisar hingga lima kasus. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri secara umum tambahan kasus baru di wilayah Yogyakarta dalam dua pekan terakhir cenderung meningkat. Kasus aktif yang ada di Kota Yogya pun sudah lebih dari 100 kasus. Apalagi sudah ada temuan varian Omicron hasil dari riwayat perjalanan yang menjalani isolasi di Kota Yogya meski teridentifikasi bukan penduduk kota.

Heroe mengaku, rencana awal PTM dengan kapasitas 100 persen akan diselenggarakan penuh pada 7 Februari 2022. Akan tetapi rencana

tersebut harus ada penundaan karena skala pertumbuhan kasus Covid-19 secara umum ada peningkatan. "Jadi mulai hari ini (kemarin) sudah kita putuskan bahwa PTM kembali menjadi 50 persen," tandasnya.

Bahkan tidak hanya PTM, aturan pertemuan-pertemuan yang melibatkan warga di kampung atau wilayah dimungkinkan ada perubahan strategi. Tidak menutup kemungkinan perlu adanya pembatasan seperti saat terjadi lonjakan kasus pada gelombang kedua pertengahan tahun 2021 lalu. Hanya strategi baru tersebut perlu dikoordinasikan secara terpadu dengan Pemda DIY. Hal ini karena kabupaten dan kota di DIY merupakan kawasan aglomerasi sehingga kebijakan penanganannya harus seirama.

Terkait temuan varian Omicron tersebut, menurut Heroe merupakan warga yang hendak meneruskan perjalanan sehingga menjalani skrining dengan hasil

positif. Setelah diteliti lebih jauh di laboratorium ternyata terkonfirmasi varian Omicron. "Saya sudah minta Dinas Pariwisata untuk mengawasi betul protokol kesehatan di perhotelan maupun kafe dan restoran. Adanya temuan positif dari perjalanan ini perlu langkah kehati-hatian dan harus dipastikan protokol kesehatan di industri pariwisata betul-betul ditegakkan secara disiplin. Terutama dari segi kapasitas dan segala macam," urainya.

Oleh karena itu, strategi baru itu nantinya akan dikuantifikasi menjadi pedoman baru dalam menjalankan berbagai aktivitas di luar ruangan. Kondisi tersebut perlu dilakukan guna menghadapi peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Yogya maupun DIY. Heroe berharap, setiap warga tidak mengendur protokol kesehatan dan tetap saling mengingatkan satu sama lain agar tidak terjadi lonjakan kasus atau sebaran yang meluas. **(Dhi)-f**

ANTISIPASI GELOMBANG TIGA COVID-19

Dewan Pastikan Kesiapan Anggaran Pemerintah

YOGYA (KR) - Pemerintah pusat telah meminta daerah untuk mengantisipasi terjadinya gelombang tiga Covid-19. DPRD Kota Yogya pun memastikan kesiapan anggaran yang dimiliki Pemkot Yogya terkait hal tersebut.

Ketua DPRD Kota Yogya Danang Rudyatmoko, berharap tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang signifikan di wilayah Kota Yogya maupun DIY. "Tentu kita semua berharap jangan sampai terjadi lonjakan. Namun sesuai arahan dari Gubernur, kita juga harus melakukan langkah antisipasi," jelasnya di kompleks Balaikota Yogya, Rabu (2/2).

Menurutnya, langkah antisipasi sudah dilakukan jajaran Pemkot Yogya sejak dalam pembahasan APBD 2022. Dalam konstruksi anggaran

yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif juga telah disiapkan alokasi untuk kebutuhan yang tidak terduga.

Danang menambahkan, anggaran tidak terduga yang disiapkan mencapai sekitar Rp 57 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu. Akan tetapi, dana itu baru bisa dikucurkan jika status wilayah sudah diputuskan tanggap darurat. "Meski secara anggaran sudah ada alokasi, tetapi jangan sampai terjadi lonjakan. Untuk meredam peningkatan kasus, tidak ada kata lain selain protokol kesehatan betul-betul ditegakkan. Apalagi setiap akhir pekan aktivitas masyarakat sudah sangat tinggi," urainya.

Di samping itu, Danang juga

berharap bed occupancy rate (BOR) atau ketersediaan kamar perawatan di rumah sakit bagi pasien Covid-19 tetap terakomodasi. Oleh karena itu, koordinasi antara satgas di tingkat kota dengan para pengelola rumah sakit rujukan tidak boleh terputus.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi. Menurutnya, APBD 2022 disusun saat masih kondisi PPKM. Sehingga sudah cukup responsif dalam menjawab berbagai kemungkinan yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Akan tetapi dirinya juga berharap laju pertumbuhan kasus baru tetap dapat terkendali serta tidak terjadi lonjakan yang berdampak serius pada aspek kesehatan maupun aktivitas masyarakat.

Melihat peningkatan kasus yang terjadi dalam beberapa hari belakangan, bukan tidak mungkin Indonesia sudah masuk pada fase gelombang tiga Covid-19. Meski alokasi biaya tidak terduga juga sudah dinilai tinggi, refocusing dan realokasi anggaran juga berpeluang kembali dilakukan. "Terutama jika nanti kebutuhan anggaran sudah tidak mencukupi, bisa kita refocusing. Kita lihat nanti bagaimana," tandasnya.

Terkait BOR rumah sakit, menurut Heroe saat ini masih sangat rendah. Kendati kasus aktif di Kota Yogya sudah mencapai angka 100 orang lebih namun mayoritas merupakan pasien tanpa gejala. Sebagian besar justru melakukan isolasi mandiri di shelter terpadu maupun perhotelan. **(Dhi)-f**

OPTIMALKAN PEMBANGUNAN SDM

DIY Alih fungsikan Jabatan Struktural ke Fungsional

YOGYA (KR) - Sebagai upaya mempercepat optimalisasi pembangunan sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan, Pemda DIY mengalihfungsikan jabatan struktural menjadi fungsional. Sebanyak 13 pejabat Eselon 3 dilantik dan disetarakan pada jenjang Fungsional Ahli Madya dan 133 pejabat Eselon 4 dilantik dan disetarakan pada jenjang Fungsional Ahli Muda.

"Regulasi penyetaraan di DIY ini telah sampai pada tahap ke 2 yang nantinya akan terus ditindaklanjuti pada tahap-tahap berikutnya. Tahap satu sendiri telah terlaksana pada akhir Desember 2021," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji saat melantik para pejabat di lingkungan Pemda DIY ini melalui mekanisme Penyetaraan Jabatan Fungsional di Bangsal Wiyata Praja, Kompleks Kepatihan, Senin (31/1).

Menurut Baskara Aji, semua pejabat atau jabatan yang sudah direkomendasikan oleh Kemenpan RB RI dan Kementerian Dalam Negeri RI, akan diisi sepenuhnya. Oleh karena itu, setiap ASN harus siap dengan perubahan ini untuk meningkatkan efektivitas kinerja. Mengingat alih fungsi dari jabatan struktural dan jabatan fungsional se-

belumnya sudah jauh hari dipersiapkan.

Ide penyetaraan itu pernah dilontarkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat memulai merintis reformasi birokrasi di Pemda DIY. Ide itu ternyata disetujui Presiden Joko Widodo untuk diterapkan secara nasional demi meningkatkan efektivitas kinerja ASN.

"Jabatan Fungsional sering diartikan sebagai jabatan yang bersifat individual, sebagai jabatan yang bisa dilakukan sendiri-sendiri tanpa saling tergantung. Namun pemahaman tersebut sudah seharusnya diubah. Karena, kinerja jabatan fungsional hanya akan berjalan optimal apabila bisa saling bekerjasama," ungkapnya.

Baskara Aji berharap para ASN bisa memanfaatkan momentum penyetaraan jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional sebagai bagian untuk menjadi titik balik dalam meningkatkan kinerja baik itu kinerja secara individual maupun kinerja adalah kolektif. "Jabatan fungsional memiliki lebih banyak kesempatan untuk pengembangan diri. Sehingga akan menjadi modal bagi SDM dan modal bagi pemerintah daerah untuk bisa menerapkan optimalisasi kerjanya," terangnya. **(Ria)-f**

LAZISMU PDM KOTA YOGYA

Salurkan Dana Diwujudkan Kegiatan

YOGYA (KR) - Program 'One Day With Lazismu Kota Yogyakarta' diselenggarakan Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta di Aula PDM Kota Yogyakarta, Jalan Sultan Agung 14, Rabu (2/2). Kegiatan tersebut dibuka oleh Sigit Haryo Yudanto SPsi selaku Wakil Ketua PDM Kota Yogyakarta dan pengamatan H Giyok Sutanto SH selaku Ketua Badan Pengawas yang sudah melakukan tugasnya.

M Da'i Iskandar SAg MSI, Ketua Lazismu PDM Kota Yogyakarta mengatakan, Rapat Kerja (Raker) Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Yogyakarta tahun 2022 dalam rangkain Prarakherda, diadakan program 'One Day With Lazismu Kota Yogyakarta'.

"Acara fokus kegiatan Prarakherda dan Pentasharrufan/ Penyaluran ZIS," kata M Da'i Iskandar SAg MSI, Rabu (2/2). Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula tausiah oleh Eka Yuhendi dari Lazismu DIY.

M Dai Iskandar SAg MSI mengatakan, dalam momentum ada 3 kegiatan Prakerda. Pertama, 'One Day With Lazismu'

dengan beragam kegiatan, yakni penyaluran dana senilai Rp 941.978.445. Dana tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan berupa dana kebencanaan, 2 unit mobil operasional kebencanaan, antar jemput santri Rumah Tahfid Umbulharjo, menyatuni 22 anak yatim, 22 bantuan UMKM, 22 duafa, 222 BBM mubaliq. Selain itu, tanaman penghijauan, tebar ikan, sembako untuk relawan kemanusiaan senilai Rp 10 juta, Save our School.

Kedua, Amil Day 13 Februari. Kegiatan dengan bersih-bersih sepanjang Jalan Malioboro, penanaman pohon, tebar benih di Sungai Code dan Sungai Gajahwong.

Ketiga, Zoom Meeting dan Poscast dengan tema 'Melejitkan Lazismu'.

Sedangkan Sigit Haryo Yudanto SPsi selaku Wakil PDM Kota Yogyakarta yang membidangi Lazismu mengatakan, Lazismu dari umat untuk umat dan orientasinya untuk mensejahterakan umat. Selain itu, pengelolaan dana lazismu untuk kesejahteraan umat. Untuk mencapai orientasi tersebut Lazismu memiliki 6 pilar pengembangan, yakni pendidikan, lingkungan hidup, ekonomi, sosial, kemanusiaan, dakwah/keagamaan. **(Jay)-f**

RRI Hadapi Tantangan Multiplatform Audience



KR-Istimewa

Diskusi publik yang diadakan oleh LPP RRI, Rabu (2/2).

YOGYA (KR) - Radio Republik Indonesia (RRI) harus mampu mengubah stigma dan melakukan perluasan produk siaran serta informasi dengan mengkrabi dunia digital. Hal ini lantaran, generasi milenial (generasi Y dan Z) lebih mengkrabi gawai mereka lewat multiplatform dan media sosial yang ada, dibanding media massa mainstream seperti radio, koran dan televisi.

"Jadi, sekali di udara (tetap di udara) itu oke sebagai sebuah semangat (korporasi). Tapi 'Sekali di Udara Tetap di Udara' menurut saya udara itu adalah digital, multiplatform. Udara dalam redefinisi baru adalah ruang digital," jelas Janoe Arijanto, CEO Dentsu Indonesia dalam diskusi publik yang diselenggarakan oleh RRI, Rabu (2/2). Diskusi menghadirkan pembicara lain Prof Hermin Indah Wahyuni (Guru Besar Ilmu Komunikasi UGM) serta Masduki dari Rumah Perubahan.

Janoe Arijanto mengungkapkan, hantaman pandemi yang menimpa media massa mainstream, ternyata tidak dirasakan media sosial (medsos). Misalnya saja, platform TikTok yang mendapat peningkatan kue iklan yang signifikan. Hal senada juga terlihat dari platform digital lainnya.

Sementara itu, Koesnaini, anggota Dewan Pengawas RRI menuturkan, tantangan digitalisasi media, tak hanya konvergensi media, tetapi juga perubahan multiplatform yang begitu cepat. "RRI sudah melangkah ke arah sana (konvergensi dan multiplatform). Tapi multiplatform ini kan tidak berhenti di saat ini saja. Jadi, RRI harus terus bergerak untuk mereposisi, memperbaiki, meningkatkan kualitas multiplatformnya, menaikkan level konvergensinya," sebut dia.

Angkasawan-angkasawati, menurut Koesnaini, harus merespons dinamika yang ada saat ini. Terlebih lagi, untuk merambah pendengar baru yang mayoritas berasal dari generasi Y dan Z. "Tantangan kami sebagai lembaga yang besar itu, kan tidak secepat lembaga swasta. Maka ini pentingnya membuka mindset pikiran teman-teman di RRI bahwa sekarang ini eranya sangat cepat berubahnya," tandas Koesnaini. **(Dev)-f**

Kedaulatan Rakyat
EPAPER
www.kr.co.id

Berlangganan Scan Barcode

Harian Kedaulatan Rakyat juga hadir dalam format koran digital atau electronic paper (epaper). Sajian berita-berita Kedaulatan Rakyat dapat Anda nikmati melalui genggam tangan Anda. Sekarang.